



BPK Periksa Anggaran Jalan Negara

PONTIANAK, TRIBUN - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ali Masykur Musa mengatakan, pihaknya sedang memeriksa anggaran perbaikan jalan negara di Kalbar. Ini disampaikan kepada wartawan saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka di Universitas Tanjungpura, Kamis (20/3).

"Tim kami sedang melakukan pemeriksaan di Kalbar. Pemeriksaan tersebut on proses, April atau Mei harus dilaporkan ke aparat penegak hukum," kata Ali.

Dia berharap, masyarakat Kalbar memberikan informasi lokasi jalan-jalan rusak kepada

” Dengan sistem e-audit, kami bisa mengakses keuangan daerah sehingga dapat menghalangi bila ada penyalahgunaan keuangan. ”

ALI MASYKUR MUSA

Anggota BPK RI

perwakilan BPK RI di Pontianak.

Ali mengatakan, perbaikan jalan tersebut memang

■ **Bersambung ke Hal. 15**

BPK Periksa Anggaran Jalan Negara **Sambungan Hal. 9**

menghambat laju perekonomian Indonesia termasuk ekonomi di Kalbar. Dalam perbaikan infrastruktur jalan, kata Ali, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp 42 triliun ke daerah-daerah termasuk Kalbar.

"Di Indonesia saja, kementerian PU mengalokasikan biaya untuk memperbaiki jalan pantura dari Cikampek-Gresik yang menghabiskan biaya Rp 1,3 triliun. Infrastruktur mempengaruhi daya saing dan kebutuhan dasar Indonesia dengan negara lain," terangnya.

Menurutnya, saat ini daya saing Indonesia berada di urutan ke 44 dari 139 negara, infrastruktur peringkat 82 dari 139 negara, dan kesehatan peringkat 62 dari 139 negara.

"APBN kita harusnya bisa mencakup 65 juta warga mis-

kin Indonesia. Dengan sistem e-audit, kami bisa mengakses keuangan daerah sehingga dapat menghalangi bila ada penyalahgunaan keuangan," ungkapnya.

Dihadapan mahasiswa dan civitas akademi Untan, Ali mengatakan peringkat korupsi Indonesia terbilang tinggi. Menurut Transparency Internasional 2012, peringkat korupsi Indonesia urutan 32 dari 118 negara.

"15 tahun setelah reformasi, penyakit korupsi cenderung meningkat. Sebanyak 317 kepala daerah berurusan dengan KPK dan 40 persen telah masuk penjara. Moralitas bisa menyelamatkan keuangan negara. Kita surplus demokrasi tapi minus moralitas. Padahal kita negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan telah di-

jadikan rule model dunia," kata Ali. (vio)